

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan dimasa desentralisasi berbeda dengan sentralisasi. Pada masa sentralisasi segala sesuatu seperti : bangunan sekolah, kurikulum, jumlah murid, buku pelajaran, cara mengajar dan sebagainya ditetapkan dan diselenggarakan oleh pemerintah secara sentral. Kewajiban kepala sekolah dan guru-guru sebagian besar hanyalah menjalankan apa yang telah ditetapkan dan diinstruksikan.

Dengan adanya desentralisasi menjadi lain, pada penyelenggaraan pendidikan masyarakat diikutsertakan dan turut serta dalam usaha-usaha pendidikan. Tanggungjawab kepala sekolah dan guru semakin banyak dan luas. Dahulu, kepala sekolah telah dianggap baik dan cakap kalau sekolahnya dapat berjalan dengan teratur tanpa menghiraukan kepentingan dan berhubungan dengan masyarakat sekitarnya, tetapi penilaian sekarang lebih dari itu.

Salah satu tugas kepala sekolah adalah sebagai pembina dan pembimbing guru agar bekerja dengan benar dalam proses pembelajaran siswanya. Dengan kata lain salah satu tugas kepala sekolah sebagai pembinaan yang dilakukan memberikan arahan, bimbingan, contoh dalam proses pembelajaran di sekolah. Berarti bahwa kepala sekolah merupakan supervisor yang bertugas melaksanakan supervisi pembelajaran.

Secara konseptual pengakuan terhadap keberadaan profesi guru mengandung arti recognition, endorsement, acceptance, trust, dan confidence yang diberikan oleh masyarakat kepada guru untuk mendidik tunas-tunas muda dan membantu mengembangkan potensinya secara profesional. Kepercayaan,

keyakinan dan penerimaan ini merupakan substansi dari pengakuan masyarakat terhadap profesi guru.

Hal ini didukung oleh Mulyasa (2006) yang mengatakan bahwa hanya 43 % guru di Indonesia yang memenuhi syarat, artinya sebagian besar guru (57 %) tidak atau belum memenuhi syarat, artinya sebagian besar guru (57 %) tidak atau belum memenuhi syarat, tidak kompeten dan tidak profesional. Padahal dalam kapasitasnya yang sangat luas, pendidikan memiliki peran dan berpengaruh positif terhadap segala bidang kehidupan dan perkembangan manusia dengan berbagai aspek kepribadiannya.

Implikasi dari pengakuan tersebut mensyaratkan guru harus memiliki kualitas yang memadai. Tidak hanya pada tataran normatif saja namun mampu mengembangkan kompetensi yang dimiliki, baik kompetensi personal, profesional, maupun kemasyarakatan dalam selubung aktualisasi kebijakan pendidikan. Hal tersebut karena guru merupakan penentu keberhasilan pendidikan melalui kinerjanya pada tataran institusional dan eksperimental, sehingga upaya peningkatan mutu pendidikan harus dimulai dari aspek “guru” dan tenaga kependidikan lainnya yang menyangkut kualitas keprofesionalannya maupun kesejahteraannya dalam satu manajemen pendidikan yang profesional.

Guru dalam menjalankan tugasnya membutuhkan bantuan orang lain dalam hal memecahkan masalah-masalah yang dihadapi untuk mewujudkan tujuan pendidikan. Misalnya untuk mengerti tujuan pendidikan, tujuan kurikuler, dan tujuan instruksional. Guru tersebut mengharapkan apa dan bagaimana memberi pengalaman belajar yang sesuai dengan kebutuhan anak dan masyarakat

yang sedang berkembang demi peningkatan mutu pengajaran. Orang yang berfungsi membantu guru dalam hal ini adalah Kepala Sekolah atau Supervisor/pengawas satuan pendidikan ataupun guru yang lebih senior yang setiap hari langsung berhadapan dengan guru. Menurut Muslim Sri Banun (2008:34) dalam upaya perbaikan dan peningkatan mutu pengajaran hanya mungkin dilakukan, apabila guru dan pembina (supervisor) mengenal dan memahami masalah pengajaran yang sedang dirasakan.

Tidak mengherankan apabila Kepala Pusat Kurikulum, Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang), Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas 2001), Siskandar menyatakan bahwa penerapan kurikulum berbasis kompetensi (KBK) menuntut kualitas guru memadai sehingga perlu meng-upgrade kemampuan guru supaya pelaksanaan kurikulum sesuai dengan harapan.

Data Balitbang Depdiknas (2001) saja menunjukkan, dari 1.054.859 guru SD Negeri ternyata hanya 42,4 persen yang layak mengajar. Berarti, sebagian besar (57,6 persennya) tidak layak mengajar (Depdiknas go.id.com). Sehingga Sapari (Kompas, 16/8/2002) berani menyimpulkan, rendahnya kualitas guru SD/MI menyebabkan pemahaman mereka terhadap inovasi pendidikan sepotong-sepotong, bahkan ada yang sama sekali tidak memahami secara substansial apa yang dikembangkan pemerintah.

Data tersebut semakin memperkuat data-data sebelumnya yang menyatakan bahwa kualitas sumber daya manusia kita pada tahun 2002 menempati angka 110 dari 173 negara, daya saing kita 47 dari 48 negara, performance system pendidikan kita berada pada nomor 38 dari 39 negara,

penguasaan matematika siswa SLTP pada urutan 34 dan penguasaan IPA pada urutan ke-32 dari 38 negara (Sucipto, 2003:2).

Secara aplikatif, diperlukan peningkatan profesionalisme guru karena guru merupakan pelaksana lapangan yang menjadi ujung tombak. Berbagai upaya pemberdayaan dapat dilakukan di antaranya dengan pembinaan profesionalisme guru dengan mensupervisi guru tersebut.

Melalui supervisi pengajaran maka seorang kepala sekolah dapat memberikan bimbingan, motivasi dan arahan agar guru dapat meningkatkan keprofesionalannya. Hal ini sesuai dengan pendapat Paramata (2002:1) dalam <http://www.jurnal.lipi.go.id> bahwa supervisi pengajaran dilakukan untuk meningkatkan kualitas guru melalui pengembangan kompetensi dan profesionalismenya, oleh karena itu supervisor juga haruslah mereka yang memiliki kompetensi dan profesional di bidang ilmu yang disupervisi dan supervisi itu sendiri.

Sedangkan menurut Sahertian (2000:46), Supervisi adalah program yang berencana untuk memperbaiki pengajaran, inti dari program supervisi pada hakekatnya adalah untuk memperbaiki hal belajar dan belajar. Program ini dapat berhasil apabila supervisor memiliki keterampilan dan cara kerja yang efisien dalam kerja sama dengan guru dan petugas pendidikan lainnya.

Pengawasan dalam sektor pendidikan merupakan salah satu fungsi manajemen yang memegang peranan penting untuk mengetahui apakah pekerjaan yang sedang dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Hal ini sesuai dengan definisi pengawasan seperti yang dikatakan oleh Siagian

(1996:170), yaitu pengawasan merupakan usaha sadar dan sistemik untuk lebih menjamin bahwa semua tindakan operasional yang diambil dalam organisasi benar-benar sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam Dictionary of Education, Good Carter (1959:87) memberi pengertian Supervisi adalah segala usaha dari petugas-petugas sekolah dalam memimpin guru dan petugas lainnya dalam memperbaiki pengajaran termasuk menstimulir, menyeleksi pertumbuhan jabatan dan perkembangan guru-guru dan merivisi tujuan-tujuan pendidikan, bahan-bahan pengajaran, metode mengajar dan evaluasi pengajaran. Program Supervisi bertumpu pada satu prinsip yang mengakui bahwa setiap manusia itu mempunyai potensi untuk berkembang. Menurut Bafadal (1992:8), Supervisi adalah suatu teknik pelayanan yang tujuan utamanya mempelajari dan memperbaiki secara bersama faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak. Sedangkan menurut Arikunto (2004:13) mengatakan ada tiga fungsi supervisi yaitu, sebagai kegiatan meningkatkan mutu pembelajaran, pemicu atau penggerak terjadinya perubahan pada unsur yang terkait dengan pembelajaran, dan sebagai kegiatan memimpin dan membimbing. Hal yang sama juga dikemukakan Sagala (2004:26) bahwa supervisor atau pengawasan meliputi tindakan untuk menuntun dan memotivasi usaha pencapaian tujuan maupun tindakan untuk mendeteksi dan memperbaiki pelaksanaan yang tidak efektif dan tidak efisien menjadi lebih efektif yang dipusatkan pada program dan tanggungjawab yang dapat merangkum semua aspek dalam organisasi.

Definisi-definisi tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa fungsi dari Supervisi adalah memajukan dan mengembangkan pengajaran sehingga proses belajar mengajar berlangsung dengan baik dan juga fungsi lain

dari supervisi adalah untuk memajukan dan mengembangkan pengajaran, agar seorang guru bisa mengajar dengan baik dan diharapkan juga murid bisa belajar dengan baik pula.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsinya yaitu melakukan penilaian dan pembinaan terhadap sekolah-sekolah, orang yang paling kompeten melakukan pengawasan adalah pengawas sekolah. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) RI No. 41 Tahun 2007 Bab.V hal.19 tentang standar proses untuk satuan pendidikan dasar dan menengah yang menyatakan bahwa kegiatan supervisi dilakukan oleh kepala sekolah dan pengawas satuan pendidikan. Seiring dengan peraturan tersebut menurut Kepmeneg, PAN Nomor 118/U/1996 juga dinyatakan bahwa pengawas sekolah adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan pendidikan di sekolah dengan melaksanakan penilaian dan pembinaan dari segi teknis pendidikan dan administrasi pada satuan pendidikan dasar dan menengah. Penilaian dalam hal ini adalah penentuan derajat berdasarkan kriteria (tolok ukur) yang ditetapkan terhadap penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Karena dengan adanya penilaian akan diketahui posisi suatu proses pendidikan. Sedangkan pembinaan mengandung pengertian memberikan arahan, memberikan bimbingan, memberikan contoh dan memberikan saran dalam pelaksanaan pendidikan di sekolah. Guru seniorpun termasuk mampu memberi pengawasan terhadap guru-guru karena guru senior telah mempunyai pengalaman yang cukup dalam kancah pendidikan di sekolahnya.

Pelaksanaan pengawasan pengawas sekolah adalah menilai dan membina penyelenggaraan pendidikan pada sejumlah satuan pendidikan/sekolah tertentu baik negeri maupun swasta yang menjadi tanggungjawabnya. Penilaian itu dilakukan untuk pengawasan penentuan derajat kualitas berdasarkan kriteria (tolok ukur) yang ditetapkan terhadap penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Sedangkan kegiatan pembinaan dilakukan dalam bentuk memberikan arahan, saran dan bimbingan (Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 020/U/1998 tanggal 6 Februari 1998). Pengawasan perlu dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan secara berkesinambungan pada sekolah yang diawasinya.

Pengawas sekolah memegang peranan penting bagi suksesnya pendidikan di sekolah karena tanggung jawab pengawas sekolah termasuk melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pendidikan di sekolah dan meningkatkan kualitas belajar mengajar/bimbingan dan hasil prestasi belajar siswa dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan. Oleh karena itu, pembinaan pengawas sekolah melalui tugas pokok dan fungsinya perlu diperhatikan secara seksama serta melalui proses perencanaan dan pemikiran yang matang pada jenjang pendidikan menengah kejuruan.

Jenjang pendidikan menengah kejuruan yang diselenggarakan pendidikan selama tiga tahun, keberadaannya sangat penting bagi persiapan pengembangan sumber daya manusia yang kompeten. Melalui Pendidikan Menengah Kejuruan, seseorang dikembangkan untuk menguasai berbagai keterampilan misalnya bangunan, mesin, elektronika, audio video dan listrik, sebagai bekal bagi dirinya untuk terampil dan berkembang nantinya setelah tamat dan untuk masa yang akan

datang. Keberhasilan pendidikan di sekolah menengah kejuruan sangat menentukan keberhasilan di dunia industri ataupun pada jenjang yang lebih tinggi lagi. Oleh karena itu berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan mutu di sekolah menengah kejuruan, seperti pembangunan gedung-gedung, melengkapi sarana dan prasarana, mengadakan seminar, workshop, training of trainer, pelatihan kepada kepala sekolah, guru dan tenaga kependidikan dan lainnya.

Menurut Hendiyat (1988:64), bertumbuhnya jumlah murid, konsep dan skope pendidikan menengah kejuruan, hal ini membuktikan perlunya program supervisi. Meningkatnya jumlah murid sekolah lanjutan menengah kejuruan serta perubahan sifat penduduk mengakibatkan perubahan tipe-tipe pelayanan sekolah menengah kejuruan. Aktivitas-aktivitas ekstra kurikuler telah memegang peranan penting di dalam pendidikan remaja dan aktivitas ini menjadi tugas penting daripada guru-guru. Pelayanan bimbingan dan penyuluhanpun diperlukan. Akibat semua itu, permasalahan pengajaran di sekolah menengah kejuruan semakin kompleks dan sulit, sehingga membutuhkan program supervisi. Hal ini sesuai dengan pendapat Wau (2008:54) bahwa pembinaan guru harus dilakukan terus menerus melalui berbagai pendekatan dan teknik. Salah satu pendekatan yang dapat dilakukan adalah melalui penerapan supervisi pendidikan.

Pembinaan pengawas sekolah melalui pelaksanaan supervisi pendidikan, diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah menengah kejuruan. Dengan melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, pengawas sekolah dapat melakukan pembinaan kepada kepala sekolah dan guru-guru terhadap kegiatan proses pembelajaran di sekolah sesuai dengan Kepmeneg PAN di atas bahwa pengawas sekolah dalam melaksanakan tugasnya melakukan penilaian dan

pembinaan. Sebelum melakukan pembinaan pengawas sekolah terlebih dahulu melakukan penilaian dengan instrumen yang baku dan terstandar untuk mengukur kinerja sekolah. Berdasarkan penilaian tersebut dan dukungan data atau informasi lainnya, pengawas melakukan pembinaan berupa, memberi arahan, memberikan bimbingan, memberikan contoh mengajar dan memberikan saran. Apabila hal ini dilakukan oleh semua pengawas sekolah menengah kejuruan secara konsekuen dan penuh tanggung jawab, maka mutu pendidikan di sekolah menengah kejuruan diharapkan akan meningkat.

Fenomena yang terjadi adalah bahwa dalam melaksanakan tugas supervisi, banyak pengawas sekolah yang belum mampu membangkitkan dan merangsang semangat guru-guru dan pegawai sekolah lainnya untuk melaksanakan tugasnya dengan baik, seperti apa yang dinyatakan Purwanto (2000:77), bahwa kegiatan yang dilakukan seorang pengawas dalam rangka supervisi adalah :

1. Membangkitkan dan merangsang semangat guru-guru dan pegawai.
2. Berusaha mengadakan dan melengkapi berbagai macam media instruksional.
3. Berusaha mengembangkan, mencari dan menggunakan metode baru.
4. Membina kerjasama yang baik dan harmonis antara guru, murid dan pegawai sekolah.
5. Berusaha mempertinggi mutu pengetahuan guru-guru dan pegawai sekolah dengan mengadakan workshop, seminar atau up-grading.

Fenomena lain adalah adanya pengawas yang diangkat tanpa melalui prosedur resmi seperti yang diatur dalam PP.No. 19 tahun 2005 Bab IV tentang standar pendidik dan tenaga kependidikan pasal 39 yaitu memiliki sertifikat pendidikan fungsional sebagai pengawas satuan pendidikan. Sehingga dalam

melaksanakan tugas kepengawasannya, pengawas tersebut tidak memiliki kompetensi yang terstandar karena tidak pernah mengikuti pendidikan dan pelatihan tentang kepengawasan.

Para pengawas lebih cenderung melaksanakan aspek pengelolaan sekolah dari pada aspek proses belajar mengajar. Hal ini disebabkan keterbatasan kemampuan pengawas dalam menguasai seluruh mata pelajaran yang ada di sekolah. Adapun yang diawasi adalah mata pelajaran yang dikuasai saja. Pada hal tugas para pengawas seharusnya adalah mencakup pembinaan terhadap pelaksanaan seluruh mata pelajaran. Hal ini disampaikan oleh Kepala Biro Kepegawaian RI, pada workshop sinkronisasi kepengawasan sekolah di LPMP Jawa tengah tanggal 7 September 2004. Fenomena ini menunjukkan kurang efektifnya pembinaan supervisi yang dilakukan oleh pengawas sekolah. Apabila hal ini berlangsung secara terus menerus, maka harapan untuk meningkatkan mutu pendidikan tidak akan terwujud.

Peninjauan yang telah dilakukan di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Padangsidempuan, ditemukan data bahwa sekolah tersebut memiliki 97 orang guru dan seorang kepala sekolah, memiliki 24 ruang belajar , 4 workshop dan ditemukan gejala umum yang berkaitan dengan pembinaan pengawas sekolah dalam melakukan supervisi perencanaan pembelajaran, interaksi belajar mengajar, evaluasi pembelajaran, dan peningkatan kompetensi guru-guru, seperti :

1. Belum efektifnya pembinaan pengawas sekolah dalam melakukan supervisi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran. Hal ini sesuai dengan pengakuan guru-guru SMKN 2 Padangsidempuan, bahwa meskipun pengawas sekolah telah melakukan pembinaan tentang perencanaan, pelaksanaan dan

evaluasi pembelajaran, namun mereka belum mampu melaksanakannya sesuai dengan tuntutan kurikulum yang berlaku.

2. Dalam melakukan supervisi pengawas sekolah lebih banyak melakukan pembinaan administratif dari pada edukatif. Hal ini ditunjukkan dengan upaya yang dilakukan pengawas dalam membina manajemen sekolah terhadap kepala sekolah dari pada melakukan pembinaan aspek edukatif seperti pengelolaan proses pembelajaran.
3. Dalam melaksanakan tugas kepengawasannya, pengawas sekolah selalu hanya berkomunikasi dengan kepala sekolah tanpa ada inisiatif untuk melakukan kunjungan kelas. Hal ini berdasarkan pengakuan guru-guru bahwa kedatangan pengawas ke sekolah lebih banyak berhubungan dengan kepala sekolah.
4. Kurangnya pembinaan pengawas sekolah untuk meningkatkan kompetensi guru-guru sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Depdiknas, menyebabkan kurangnya pemahaman guru-guru sekolah tersebut tentang wawasan kependidikan, sehingga dalam melaksanakan tugas mereka hanya melakukan hal-hal biasa (rutinitas) tanpa ada usaha untuk melakukan terobosan yang berarti sesuai dengan perkembangan dunia pendidikan. Hal tersebut mempengaruhi kinerja mereka dalam menghasilkan lulusan yang bermutu dan berdampak terhadap rendahnya kepercayaan masyarakat untuk menyekolahkan anaknya di sekolah ini.

Fenomena umum inilah yang membuat peneliti tertarik melakukan penelitian di SMKN 2 Padangsidempuan, untuk mengetahui lebih jauh dan mendalam tentang implementasi mensupervisi guru dalam perencanaan

pembelajaran, interaksi belajar mengajar, evaluasi pembelajaran, peningkatan kompetensi guru, serta efektivitas dan kompetensi pengawas sekolah.

B. Fokus Penelitian

Dalam paradigma penelitian kualitatif, fokus dan masalah penelitian merupakan suatu hal yang harus ditetapkan secara jelas dan tegas. Sebab keduanya berfungsi sebagai acuan atau pedoman untuk mengarahkan pembahasan agar lebih tajam dan lebih terarah.

Adapun yang menjadi fokus penelitian dalam tesis ini adalah kegiatan pengawas sekolah, kepala sekolah, guru senior dalam melakukan supervisi :

1. Perencanaan pembelajaran, interaksi belajar mengajar, dan evaluasi pembelajaran di SMKN 2 Padangsidempuan.
2. Peningkatan kompetensi guru-guru SMKN 2 Padangsidempuan.
3. Efektivitas dan kompetensi pengawas sekolah terhadap peningkatan mutu SMKN 2 Padangsidempuan.

C. Masalah

Bertitik tolak dari latar belakang penelitian dan fokus penelitian, maka yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah kegiatan pengawas sekolah, kepala sekolah, guru senior mensupervisi guru dalam perencanaan pembelajaran, interaksi belajar mengajar, dan evaluasi pembelajaran di SMKN 2 Padangsidempuan ?
2. Bagaimanakah kegiatan pengawas sekolah, kepala sekolah, guru senior mensupervisi guru dalam peningkatan kompetensi guru-guru SMKN 2 Padangsidempuan ?

3. Bagaimanakah efektivitas dan kompetensi pengawas sekolah terhadap peningkatan mutu SMKN 2 Padangsidimpuan?

D. Tujuan

Dari berbagai permasalahan yang diajukan, seperti latar belakang masalah, fokus penelitian, dan masalah penelitian, maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mendeskripsikan kegiatan pengawas sekolah, kepala sekolah, guru senior mensupervisi guru dalam membuat perencanaan pembelajaran, interaksi belajar mengajar, dan evaluasi pembelajaran di SMKN 2 Padangsidimpuan.
2. Mengetahui bagaimana kegiatan pengawas sekolah, kepala sekolah, guru senior mensupervisi guru dalam meningkatkan kompetensi guru-guru SMKN 2 Padangsidimpuan.
3. Mengetahui efektivitas dan kompetensi pengawas sekolah dalam mensupervisi guru-guru SMKN 2 Padangsidimpuan dalam peningkatan mutu sekolah kejuruan.

E. Manfaat

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai :

1. Bahan masukan bagi para pengawas sekolah, kepala sekolah, guru senior agar dapat menentukan kegiatan mensupervisi guru yang benar dan tepat dalam perencanaan pembelajaran, interaksi belajar mengajar dan evaluasi pembelajaran di sekolah binaannya.
2. Masukan bagi Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kota Padangsidimpuan dalam melakukan pembinaan bagaimana mengefektivaskan dan mengkompetensikan seorang pengawas sekolah, kepala sekolah, guru senior

dalam mensupervisi guru-guru SMKN 2 Padangsidempuan dalam peningkatan mutu sekolah menengah kejuruan.

3. Bahan kajian bagi instansi atau lembaga terkait khususnya Dinas Pendidikan Kota Padangsidempuan dalam menentukan kebijakan yang berkaitan dengan tugas-tugas kepengawasan dalam melakukan supervisi pendidikan.
4. Bahan masukan dan pertimbangan bagi para peneliti berikutnya dalam melakukan penelitian di lembaga pendidikan.

